

**Judul** : DPR minta pemerintah jaga pasokan & harga, manfaat cadangan beras harus dirasakan masyarakat  
**Tanggal** : Rabu, 29 April 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

DPR Minta Pemerintah Jaga Pasokan & Harga

## Manfaat Cadangan Beras Harus Dirasakan Masyarakat

ANGGOTA Komisi IV DPR Alien Mus meminta Pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tengah kondisi geopolitik global. Dia mengingatkan, Pemerintah tidak boleh terlena meskipun cadangan beras nasional telah mencapai 5 juta ton.

"Capaian ini tentu sangat baik dan menjadi bukti kerja keras Pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan," ujar Alien, Selasa (28/4/2026).

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengumumkan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang Perum Bulog telah mencapai 5.000.198 ton. Data tersebut merujuk pada catatan Bulog per pukul 08.55 WIB pada Kamis (23/4/2026). "Itu berkat kerja keras kita semua," kata Amran, di Gudang Bulog, Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Namun, kata Alien, cadangan bukan hal satu-satunya yang harus diperhatikan. Stabilitas harus tetap dijaga, baik dari sisi distribusi maupun harga agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Sebab, ketidakpastian global dapat

berdampak langsung pada sektor pangan. Mulai dari terganggunya distribusi logistik, meningkatnya biaya pengiriman, hingga tekanan terhadap harga komoditas.

Untuk itu, Alien meminta Pemerintah memastikan distribusi beras berlangsung merata hingga ke seluruh wilayah, sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga di pasaran. Komisi IV DPR terus mendorong optimalisasi peran Perum Bulog dalam menjaga keseimbangan pasar, termasuk melalui pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan.

"Stok yang besar harus diiringi dengan manajemen distribusi yang baik. Jangan sampai stok melimpah, tetapi harga di masyarakat tetap tinggi," wanti-wanti politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, ketersediaan stok beras yang besar juga memberikan posisi yang relatif aman bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dalam upaya menjaga kesinambungan ketahanan pangan, Alien mengusulkan penguatan pengawasan dan penerapan kebijakan yang tepat. Karena itu,



Alien Mus

kolaborasi berbagai pihak sangat penting dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga tetap terjaga.

Alien menambahkan, pencapaian stok beras tertinggi ini harus dapat dipastikan stabilitas pasokan dan harga yang terjangkau di tingkat masyarakat. "Jadi kita perlu berkolaborasi melakukan pengawasan bersama," imbuhnya.

Sementara, anggota Komisi IV DPR Rina Saadah optimistis, target swasembada pangan nasional pada tahun 2029 dapat tercapai. Keyakinan ini didasari pada keberhasilan Indonesia

dalam mencapai swasembada beras pada tahun 2025. "Ini menjadi fondasi krusial bagi kemandirian pangan dan komoditas strategis lainnya," ujarnya.

Rina menegaskan, target tiga tahun ke depan yang dicanangkan Presiden Prabowo bukanlah angan-angan, tapi sasaran nyata yang harus disokong oleh seluruh pemangku kepentingan. Data menunjukkan kinerja sektor pangan sepanjang 2025 cukup impresif, dengan stok beras Bulog sempat menyentuh angka 4,2 juta ton pada Juni 2025. Memasuki awal 2026, stok beras nasional bahkan tercatat mencapai 12,53 juta ton, melonjak 49,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tercapainya swasembada beras, kata Rina, menandakan Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Keberhasilan ini menjadi pijakan penting menuju swasembada pangan nasional secara menyeluruh," ujar politikus PKB ini.

Untuk itu, Rina memaparkan sejumlah langkah strategis agar target swasembada pangan di 2029 tidak sekadar menjadi simbol. Pertama, Pemerintah harus

memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, tepat volume, dan terjangkau bagi petani.

"Sejauh ini pembenahan distribusi pupuk bersubsidi oleh Pemerintah menunjukkan progres baik. Akses petani ke pupuk subsidi relatif lebih mudah dibandingkan dengan tahun sebelumnya," puji legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.

Pemerintah, tambah Rina, harus mempercepat perbaikan sistem irigasi dan pembangunan jalan produksi untuk memangkas biaya logistik pertanian. Langkah ini penting untuk memastikan produksi panen petani bisa terserap pasar dengan harga baik. "Juga menjaga harga jual hasil panen di tingkat petani agar tetap menguntungkan, sehingga petani memiliki gairah untuk terus berproduksi," katanya.

Rina menegaskan, kunci keberhasilan swasembada pangan terletak pada kesejahteraan petani. Jika petani mendapatkan keuntungan yang layak, maka produktivitas nasional akan meningkat secara alami. Namun, hal ini memerlukan sinergi lintas sektoral antara Pemerintah Pusat, daerah, BUMN, hingga pelaku sektor swasta. ■ TIF